



Sistem Kebijakan Publik Sarana Transportasi Kereta Api di Indonesia

Dr. Suwardi, SH., M.Hum



SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK SARANA TRANSPORTASI KERETA API DI INDONESIA

PENULIS

Dr. Suwardi, SH., M.Hum



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK SARANA TRANSPORTASI KERETA API DI INDONESIA

Dr. Suwardi, SH., M.Hum

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-623-8522-71-2

UKURAN:

iii + 63 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Mei 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan atas izin Allah SWT kemudahan serta karunia Nya, sehingga buku monograf ini dengan judul “Sistem Kebijakan Publik Sarana Transportasi Kereta Api di Indonesia” dapat kami selesaikan sehingga dapat bermanfaat bagi Mahasiswa sebagai materi Perkuliahan sebagai pembekalan kepribadian karakter sebagai calon pemimpin Bangsa Indonesia kedepan. Pada kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian buku monograf ini kepada Rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu kami ucapkan terima kasih atas doa dan partisipasi nya.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kami semua. Semoga buku monograf ini bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan dan kepada siapa saja yang memerlukan terkait dengan materi tersebut.

Surabaya, Mei 2024

Penulis,

Dr. SUWARDI, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Inovasi yang Ditargetkan.....	4
B. Perkeretaapian di Indonesia.....	5
C. Pelayanan Kereta Api	10
D. Pelayanan Eksternal Kereta Api.....	15
E. Pelayanan Internal Kereta Api.....	17
F. Solusi Permasalahan Perkeretaapian	18
BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	
BADAN PENYELENGGARA	22
A. Kebijakan Publik	22
B. Tahapan Rangkaian Kebijakan Publik	23
C. Definisi Sarana dan Prasarana	25
D. Pengertian Perkeretaapian	26
E. Pengertian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	30
F. Keselamatan dan Keamanan Transportasi dalam Sistranas.....	31
BAB III SISTEM DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI....	37
A. Sistem Manajemen Transportasi	37
B. Definisi Sistem Transportasi	39
C. Manfaat Segi Aspek Ekonomi.....	42
D. Manfaat Segi Aspek Politis	42

BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN	
KERETA API DI INDONESIA	43
A. Kepuasan terhadap Pelayanan Perkeretaapian.....	43
B. Pelayanan dalam Hal Keamanan	49
BAB V KEBIJAKAN KEAMANAN DAN	
KESELAMATAN KERETA API DI	
INDONESIA.....	50
A. Upaya Mendapatkan Jaminan Keamanan	
Penumpang	50
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perkeretaapian	
dalam Perjanjian Pengangkutan.....	53
C. Tanggung Jawab Para Pihak Perkeretaapian	
dalam Perjanjian Pengangkutan.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62

